

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini di negara Indonesia bahkan dunia sedang digemparkan dengan adanya wabah covid-19 (*corona virus*), sejak tanggal 11 Maret 2020 WHO atau organisasi kesehatan dunia menyatakan wabah penyakit akibat virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global (Valerisha & Putra, 2020). Virus corona dapat menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia terutama pada sistem pernafasan, apabila menghinggapi dalam tubuh manusia maka akan menyebabkan infeksi pernafasan seperti flu biasa bahkan lebih parahnya dapat menyebabkan penyakit seperti *Middle East Respiratory Syndrom (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* (Halim et al., 2021). Peningkatan jumlah kasus yang terus meningkat memberikan dampak buruk bagi kesehatan hingga menyebabkan kematian (Janssen & van der Voort, 2020).

Penyebaran yang sangat cepat dan tingkat kematian yang tinggi dinyatakan sebagai gangguan yang parah, hal ini kebanyakan ditemukan pada pasien yang terinfeksi dan mengalami gangguan pada saluran pernafasan yang akut (ARDS, dan kegagalan organ ganda atau memiliki penyakit bawaan (Yang et al., 2020). Wabah virus membawa rasa urgensi untuk beradaptasi melawan pandemi, hal ini memberikan tuntutan tinggi pada pemerintah dalam menunjukkan bahwa pemerintah dapat gesit dan adaptif (Janssen & van der Voort, 2020). Penanganan pandemi Covid-19 di berbagai negara tidak hanya memperlihatkan tingkat efektivitas dalam penanganan tetapi juga menyoroti esensi dari krisis nasional

sistem manajemen dalam penahanan penyakit di dalam dan melintasi batas-batas nasional (Mutiarin et al., 2021; Oh, 2021).

Kehadiran virus corona dalam waktu yang relatif cepat di era informasi seperti saat ini juga berimbas pada cepatnya penyebaran informasi atau kabar apapun tentang virus mematikan (Nurislaminingsih, 2020). Kondisi yang dinamis saat ini membutuhkan tata kelola yang *agile government* atau yang diartikan sebagai pemerintahan yang tangkas, gesit, dan cerdas, yang mana Pemerintahan yang gesit (*agile governance*) menjadi kunci yang dibutuhkan dalam era disrupsi yang terjadi saat ini (Vernanda, 2020). Konsepnya *agile government* diciptakan dalam bidang rekayasa lunak dan diperluas ke studio organisasi atau budaya organisasi dan metode kolaborasi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dan kemampuan beradaptasi (Janssen & van der Voort, 2020).

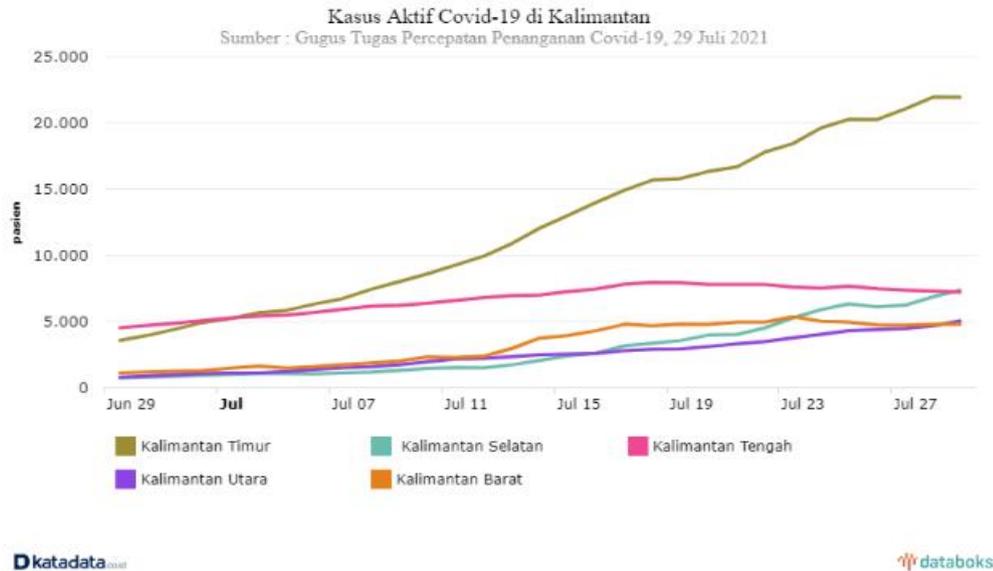
Penanganan pandemi merupakan langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah dengan konsep *agile government*, salah satunya dengan menyediakan vaksinasi untuk masyarakat. Pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan oleh beberapa negara di dunia, *World Health Organization (WHO)* merekomendasikan kepada seluruh negara untuk melakukan vaksinasi secara massal (Makmun & Hazhiyah, 2020). Penanganan Covid-19 di Indonesia yang tercantum dalam PerPres (Peraturan Presiden) No 99 tahun 2020 yang kemudian diubah ke dalam PerPres Nomor 14 Tahun 2021, yang berisi tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (JDIH BPK RI, 2021). Pelaksanaan vaksinasi juga tercantum dalam

PERMENKES (Peraturan Menteri Kesehatan) No 10 tahun 2021 (Kemenkes RI, 2021).

Pulau Kalimantan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang telah melakukan penanganan covid-19 dengan melaksanakan vaksinasi untuk masyarakatnya, Pulau ini merupakan pulau terbesar ke tiga di dunia dengan luas wilayah 743.330 km<sup>2</sup>. Yang terbagi menjadi 5 provinsi yaitu, provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di pulau Kalimantan pada tahun 2020 mencapai 16.769.70 juta jiwa atau 6,15 persen (Statistik, 2021). Dengan luas wilayah sebesar 743.330 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang mencapai 16.769.70 juta jiwa, maka akan memperhambat pelaksanaan vaksinasi dengan dan memakan waktu yang lama di pandemi saat ini, maka hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi pemerintah.

Berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia (*WHO*) Pulau Kalimantan merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kenaikan kasus covid-19 tertinggi di Indonesia, hal ini tertuang *Situation Report-64* yang dirilis oleh WHO (Permana, 2021) . Mengingat angka penularan virus yang sangat cepat, maka pemerintah harus gesit dalam mengambil langkah untuk menekankan angkat penularan covid-19. Pada gambar 1 di bawah ini menjelaskan tentang angka kenaikan kasus covid-19 di Pulau Kalimantan selama dua pekan yang semakin meningkat.

**Gambar 1. Kasus Aktif Covid-19 di Kalimantan**



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Gambar 1 menjelaskan bahwa angka kenaikan kasus Covid-19 di pulau Kalimantan semakin meningkat dari bulan Juni tanggal 29 sampai dengan 27 Juli 2021, dari kelima Provinsi di Kalimantan, tiga diantaranya memiliki angka kenaikan kasus aktif covid-19 tertinggi yaitu, provinsi Kalimantan Timur mencatat kasus aktif dari covid-19 sebanyak 23,4% dari 17.830 orang menjadi 22.014 orang. Kemudian Kalimantan Selatan sebanyak 63,2% dari 4.525 orang pada bulan 29 juli menjadi 7.387. dan untuk kenaikan kasus aktif covid-19 di Kalimantan Utara tercatat sebesar 45,2% dari 3.489 orang menjadi 5.068 orang. Sementara dua provinsi diantaranya mengalami penurunan yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dari 7.788 atau 7,4% menjadi 7.211 kasus dan provinsi Kalimantan Barat dari 4.954 atau 2,8% menjadi 4.811 orang (Databoks, 2021b).

Lima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, jumlah kasus yang paling tinggi berada di provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian pemerintah

diharuskan mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam penanganan menekankan tingkat penyebaran covid-19 di Pulau Kalimantan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan konsep *agile government* pada implementasi vaksinasi di seluruh provinsi yang ada pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan *agile government* dalam implementasi Vaksinasi Covid-19 di Pulau Kalimantan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan penguatan *agile government* dalam mengimplementasikan Vaksinasi Covid-19 studi kasus di Pulau Kalimantan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

#### **1. Manfaat teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan yang terkait dengan *agile government* dalam implementasi Vaksinasi Covid-19.

## 2. Manfaat praktis

Kemudian pada manfaat praktis yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan ataupun sebagai bahan pendukung untuk penelitian-penelitian selanjutnya.